

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-115.01.2.686285/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
 3. Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 4. Kode>Nama Satker : (686285) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 63.900.880.000 (ENAM PULUH TIGA MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 63.900.880.000
115.01.06.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 63.900.880.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp. 63.900.880.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNB		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
		6. SBSN PBS	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 63.900.880.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS : 0781-3780-1039-0019

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001